



## **PELATIHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN BAGI STAF KELURAHAN UNTUK EFISIENSI PELAYANAN MASYARAKAT DI NEGERI PASSO KECAMATAN BAGUALA KOTA AMBON**

**Jeanly Waisapy<sup>1</sup>, Hendry Selanno<sup>2</sup>, Indah Cahyani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Pattimura

**Corresponding Author:** jeanly Waisapy

[jeanlywaisapy@gmail.com](mailto:jeanlywaisapy@gmail.com)

**Received** 07 Agustus 2025; **Accepted** 15 Oktober 2025; **Online Published** 30 Oktober 2025

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme staf kelurahan dalam mengelola administrasi perkantoran secara efektif dan efisien. Pelatihan ini berfokus pada penerapan administrasi modern yang memanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan surat-menyurat digital, serta penyusunan dokumen pelayanan publik yang sesuai standar tata naskah dinas. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah interaktif, demonstrasi penggunaan aplikasi administrasi, serta pendampingan langsung dalam simulasi pengelolaan arsip elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta pelatihan mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep administrasi perkantoran modern serta keterampilan operasional menggunakan perangkat digital dalam mendukung tugas pelayanan publik. Selain itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan kelurahan sebagai upaya menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi model bagi kelurahan lain di wilayah Kecamatan Baguala dalam menerapkan sistem administrasi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Keywords** : kewirausahaan, mahasiswa, pelatihan

### **PENDAHULUAN**

Administrasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pemerintahan kelurahan, administrasi perkantoran menjadi tulang punggung dalam mengelola berbagai dokumen dan kegiatan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya masih banyak aparatur kelurahan yang menjalankan kegiatan administrasi secara manual dan konvensional, sehingga menghambat kecepatan pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola administrasi perkantoran secara modern agar

mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis (Hasibuan, 2020).

Negeri Passo sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Baguala memiliki peran strategis karena menjadi pusat pertumbuhan wilayah dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Aktivitas pelayanan administrasi di wilayah ini cukup padat, meliputi pengurusan surat keterangan, arsip kependudukan, hingga koordinasi kegiatan sosial masyarakat. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa sebagian staf kelurahan masih menggunakan sistem administrasi manual, seperti pencatatan arsip menggunakan buku besar dan surat menyurat secara konvensional. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan serta risiko

kehilangan data penting yang belum terdigitalisasi (Kurniawan, 2022).

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah paradigma manajemen pemerintahan dari sistem tradisional menuju tata kelola digital. Pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB mendorong implementasi e-Government di seluruh jenjang pemerintahan, termasuk tingkat kelurahan, guna memperkuat transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Transformasi ini menuntut aparatur di tingkat kelurahan untuk menguasai keterampilan teknis dalam pengelolaan administrasi perkantoran modern, termasuk penggunaan aplikasi perkantoran digital, sistem arsip elektronik, dan tata naskah dinas berbasis teknologi (Kemenpan-RB, 2023).

Namun demikian, tantangan terbesar dalam penerapan sistem administrasi modern di kelurahan bukan hanya pada penyediaan sarana teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Banyak aparatur yang belum memiliki kemampuan memadai dalam menggunakan perangkat digital, seperti pengolahan dokumen, manajemen arsip elektronik, dan komunikasi administrasi berbasis internet. Akibatnya, pemanfaatan teknologi sering kali tidak optimal dan cenderung digunakan sebatas formalitas, bukan sebagai instrumen peningkatan kinerja pelayanan publik (Suryana, 2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan administrasi perkantoran modern di Negeri Passo hadir sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam menjawab tantangan tersebut. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman teoritis sekaligus keterampilan praktis kepada staf kelurahan agar mampu mengelola pekerjaan administrasi dengan cara yang lebih efisien, sistematis, dan berbasis teknologi. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *capacity building* dalam administrasi publik, yakni memperkuat kemampuan individu dan institusi agar dapat mencapai kinerja optimal (Keban, 2021).

Selain peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai profesionalisme, disiplin, dan akuntabilitas dalam bekerja. Administrasi yang tertib dan transparan merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan staf yang terampil secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab dalam mengelola dokumen serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Dwiyanto, 2017).

Pelatihan administrasi perkantoran modern juga memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program, seperti *Smart Governance* dan *Digital Government Roadmap 2025*, menekankan pentingnya penerapan sistem kerja digital di lingkungan birokrasi. Dengan pelatihan ini, staf kelurahan di Negeri Passo diharapkan dapat memahami arah kebijakan tersebut dan mampu mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga terwujud pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan (Kominfo, 2024).

Dari hasil wawancara awal dengan perangkat kelurahan, diketahui bahwa sebagian besar staf memiliki semangat tinggi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan di bidang teknologi administrasi, namun masih terkendala oleh kurangnya pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Selama ini, pelatihan yang diterima bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas praktik administrasi digital yang sesuai dengan kebutuhan kerja mereka. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berfokus pada peningkatan keterampilan langsung yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari (Lestari & Suryani, 2021).

Dalam konteks pelayanan publik di era modern, efisiensi dan kecepatan menjadi ukuran utama kualitas birokrasi. Masyarakat menuntut pelayanan yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga transparan dan mudah

diakses. Melalui penerapan administrasi perkantoran modern, diharapkan kelurahan dapat mempercepat proses birokrasi, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi data pelayanan. Dengan demikian, sistem kerja kelurahan menjadi lebih produktif dan berorientasi pada hasil (*result-oriented management*) (Osborne & Gaebler, 1992).

Kegiatan pelatihan ini juga menjadi sarana untuk membangun kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintahan lokal. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian seperti ini tidak hanya memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengembangan masyarakat, tetapi juga memberi kesempatan bagi civitas akademika untuk memahami dinamika administrasi publik di lapangan. Sinergi ini akan menghasilkan pembelajaran dua arah yang bermanfaat, baik bagi kelurahan maupun lembaga pendidikan (Fayolle & Gailly, 2015).

Selain memberikan manfaat langsung kepada peserta, kegiatan ini juga memiliki potensi jangka panjang untuk mendukung modernisasi tata kelola pemerintahan di Kecamatan Baguala secara keseluruhan. Jika diterapkan secara konsisten, pelatihan ini dapat menjadi model replikasi bagi kelurahan lain dalam menerapkan sistem administrasi digital yang sederhana, efektif, dan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menekankan kemandirian pemerintah lokal dalam mengelola sumber daya dan pelayanan masyarakat (Keban, 2021).

Dengan latar belakang tersebut, pelatihan administrasi perkantoran modern di Negeri Passo tidak hanya menjadi kegiatan teknis semata, tetapi juga bagian dari upaya strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan lokal. Pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan aparatur kelurahan yang profesional, adaptif terhadap teknologi, serta memiliki kesadaran akan pentingnya pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Melalui kolaborasi antara

perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan birokrasi yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan staf kelurahan Negeri Passo sebagai peserta utama. Kegiatan berlangsung di kantor kelurahan selama dua hari dengan metode pelaksanaan yang menggabungkan ceramah interaktif, pelatihan praktik langsung, serta sesi diskusi kelompok. Pendekatan partisipatif ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga aktif dalam proses belajar melalui tanya jawab, simulasi, dan studi kasus yang relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini berorientasi pada *learning by doing*, yaitu peserta belajar melalui praktik dan pengalaman langsung (Kolb, 2015).

Tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga bagian utama. Tahap pertama adalah pengenalan konsep administrasi perkantoran modern, di mana peserta mendapatkan pemahaman tentang pentingnya transformasi digital, efisiensi kerja, serta prinsip tata naskah dinas yang sesuai dengan regulasi terbaru. Tahap kedua adalah pelatihan teknis dan praktik penggunaan aplikasi perkantoran digital, seperti pengelolaan surat masuk dan keluar, penataan arsip elektronik, serta pengelolaan data pelayanan menggunakan sistem berbasis komputer. Pada tahap ini peserta berlatih secara langsung dengan panduan dari tim pengabdian untuk memastikan pemahaman dan keterampilan yang merata di antara seluruh peserta.

Tahap ketiga adalah pendampingan dan evaluasi hasil pelatihan, di mana peserta diminta untuk menerapkan simulasi pengelolaan dokumen pelayanan

publik menggunakan perangkat digital. Tim pelaksana kemudian melakukan observasi dan memberikan umpan balik atas hasil kerja peserta, baik dari segi kerapian dokumen, efisiensi waktu, maupun ketepatan format administrasi. Evaluasi juga dilakukan melalui kuesioner sederhana untuk menilai peningkatan pengetahuan dan kepuasan peserta terhadap pelatihan. Dari hasil evaluasi awal, terlihat adanya peningkatan kemampuan peserta dalam mengoperasikan komputer dan memahami pentingnya administrasi berbasis teknologi.

Selain pendekatan teknis, kegiatan ini juga menekankan pada aspek etika dan budaya kerja birokrasi. Selama pelatihan, peserta diarahkan untuk memahami nilai-nilai profesionalisme, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan administrasi. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penerapan sistem modern tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bermakna secara moral dalam konteks pelayanan publik. Melalui kombinasi antara teori, praktik, dan pembentukan nilai-nilai kerja, diharapkan staf kelurahan Negeri Passo mampu menjadi aparatur yang cakap secara digital dan berintegritas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

## **HASIL PENELITIAN**

Administrasi publik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Di era digital seperti saat ini, sistem administrasi yang modern menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap instansi, termasuk pada tingkat pemerintahan kelurahan. Administrasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelayanan publik. Menurut Hasibuan (2020), administrasi yang tertib dan terstruktur merupakan cerminan profesionalisme aparatur serta menjadi indikator utama keberhasilan birokrasi. Oleh karena itu, transformasi menuju

administrasi perkantoran modern menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Negeri Passo, yang terletak di Kecamatan Baguala, merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Ambon yang memiliki tingkat aktivitas pelayanan publik cukup tinggi. Setiap hari, staf kelurahan melayani berbagai urusan administrasi masyarakat seperti pengurusan surat keterangan, pencatatan kependudukan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sistem administrasi yang digunakan masih didominasi oleh metode manual dan konvensional. Kondisi ini sering kali menyebabkan penumpukan pekerjaan, keterlambatan pelayanan, dan risiko kehilangan data. Hal ini sejalan dengan temuan Dwiyanto (2017) yang menyebutkan bahwa keterlambatan dalam pelayanan publik sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi dan kurangnya kompetensi aparatur di lapangan.

### **Peningkatan Kompetensi dan Pemahaman Staf terhadap Administrasi Perkantoran Modern**

Pelaksanaan kegiatan pelatihan di Negeri Passo menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan staf kelurahan dalam memahami konsep administrasi perkantoran modern. Sebelum kegiatan dimulai, sebagian besar peserta masih beranggapan bahwa administrasi hanyalah kegiatan pencatatan dan pengarsipan konvensional. Namun, setelah mengikuti sesi pemaparan dan diskusi interaktif, mereka mulai memahami bahwa administrasi modern mencakup sistem kerja yang terintegrasi dengan teknologi informasi, efisiensi waktu, serta akurasi dalam pengelolaan data (Kuratko, 2017). Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam membangun pola pikir baru di lingkungan kerja pemerintahan tingkat kelurahan.

Pada tahap pelatihan teknis, peserta diajarkan cara menggunakan aplikasi perkantoran digital yang

dapat membantu mempercepat proses surat-menyurat dan pengarsipan. Mereka belajar mengelola surat masuk dan keluar secara elektronik, membuat arsip digital, serta menyusun laporan pelayanan dengan format yang lebih sistematis. Melalui metode praktik langsung, peserta terlihat antusias dan cepat beradaptasi dengan sistem baru. Hasil observasi menunjukkan peningkatan kecepatan kerja rata-rata hingga 40% dibandingkan dengan metode manual yang selama ini digunakan.

Selain keterampilan teknis, peserta juga memperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip tata naskah dinas yang baik, seperti penggunaan kode surat, penyimpanan dokumen sesuai klasifikasi, dan pentingnya menjaga kerahasiaan data publik. Hal ini sangat penting dalam konteks pemerintahan lokal, karena kesalahan administrasi dapat berakibat pada keterlambatan pelayanan dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Dengan pelatihan ini, staf kelurahan mulai menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya tertib administrasi dan dokumentasi yang rapi serta dapat dipertanggungjawabkan (Dwiyanto, 2017).

Kegiatan juga memperlihatkan adanya perubahan sikap positif di kalangan peserta. Mereka tidak hanya belajar menguasai perangkat digital, tetapi juga mulai menumbuhkan semangat profesionalisme dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dalam sesi refleksi, beberapa peserta mengakui bahwa sebelumnya mereka menganggap kegiatan administrasi sebagai rutinitas yang monoton, namun setelah pelatihan ini mereka menyadari bahwa administrasi yang modern merupakan jantung dari pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Perubahan mindset ini menjadi capaian penting dalam upaya reformasi birokrasi di tingkat kelurahan.

Dalam konteks pembelajaran orang dewasa (*andragogi*), pelatihan ini dinilai berhasil karena mampu menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor peserta. Pendekatan *experiential learning* yang diterapkan memungkinkan peserta untuk belajar melalui pengalaman langsung, mencoba, dan merefleksikan hasilnya (Kolb, 2015). Hal ini memperkuat kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan baru dalam konteks kerja yang nyata. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga transformasional dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur kelurahan.

Evaluasi akhir menunjukkan bahwa 90% peserta mengalami peningkatan skor pada aspek pemahaman konsep dan keterampilan teknis berdasarkan hasil kuesioner pascapelatihan. Selain itu, sebagian besar peserta mengungkapkan keinginan untuk terus memperdalam keterampilan digital dan mengimplementasikan sistem administrasi berbasis teknologi dalam rutinitas kerja harian. Temuan ini mengindikasikan keberhasilan program dalam menumbuhkan motivasi belajar dan kesadaran akan pentingnya modernisasi tata kelola administrasi publik.

Dengan meningkatnya kemampuan staf kelurahan dalam mengelola administrasi perkantoran modern, diharapkan pelayanan publik di Negeri Passo akan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Pelatihan ini bukan hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan kompetensi, tetapi juga membuka jalan menuju perubahan budaya kerja yang lebih produktif dan berbasis teknologi. Hasil ini membuktikan bahwa pemberdayaan aparatur melalui pelatihan praktis dapat menjadi strategi efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan zaman.

### **Implementasi dan Dampak Pelatihan terhadap Efisiensi Pelayanan Masyarakat**

Pasca pelaksanaan kegiatan pelatihan, terlihat adanya perubahan nyata dalam tata kelola administrasi di kantor Kelurahan Negeri Passo.

Beberapa peserta mulai menerapkan sistem digital dalam pengelolaan arsip dan surat-menyurat, meskipun masih dalam tahap sederhana. Mereka mulai membuat format surat elektronik, menyimpan dokumen di folder digital, serta menggunakan spreadsheet untuk mencatat data pelayanan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan telah memberikan dorongan konkret untuk mengubah cara kerja tradisional menjadi lebih efisien dan terorganisir.

Dampak positif lain yang diamati adalah meningkatnya koordinasi internal antarstaf. Dengan sistem kerja yang lebih terstruktur, komunikasi antarbagian menjadi lebih lancar karena setiap dokumen tersimpan dengan baik dan mudah diakses. Proses pelayanan masyarakat seperti penerbitan surat keterangan atau laporan kegiatan menjadi lebih cepat dan minim kesalahan. Masyarakat pun mulai merasakan manfaatnya melalui pelayanan yang lebih tertib dan profesional, sehingga kepercayaan terhadap kinerja kelurahan meningkat (Hasibuan, 2020).

Selain dari sisi efisiensi, pelatihan ini juga berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola data publik. Sebelumnya, banyak dokumen penting yang tercecer atau sulit ditemukan karena penyimpanan manual. Setelah pelatihan, staf mulai menerapkan sistem klasifikasi dan penamaan arsip digital yang memudahkan proses pencarian dan pelaporan. Dengan demikian, kegiatan ini turut memperkuat aspek akuntabilitas dan transparansi yang menjadi prinsip utama *good governance* (Keban, 2021).

Hasil monitoring menunjukkan bahwa perubahan perilaku kerja aparatur tidak hanya muncul di tingkat individu, tetapi juga mulai membentuk budaya kerja baru di lingkungan kelurahan. Setiap staf mulai memiliki kesadaran bersama untuk bekerja lebih disiplin, menghargai waktu, dan menjaga kualitas pelayanan. Kepala kelurahan juga menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan

inspirasi untuk menerapkan sistem administrasi digital secara menyeluruh, termasuk pada arsip keuangan dan data kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat memiliki efek berantai yang mampu memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan lokal.

Secara institusional, keberhasilan pelatihan ini memberikan kontribusi terhadap terwujudnya reformasi birokrasi di tingkat kelurahan. Modernisasi administrasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi perubahan paradigma menuju tata kelola yang efisien, terbuka, dan berorientasi pada hasil. Dengan meningkatnya efisiensi dan kecepatan pelayanan, kelurahan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih produktif dan memberikan pelayanan yang tepat sasaran kepada masyarakat (Osborne & Gaebler, 1992).

Dampak sosial dari kegiatan ini juga terasa di tingkat masyarakat. Warga mulai lebih percaya terhadap pelayanan publik karena melihat perubahan nyata dalam respons dan kecepatan kelurahan dalam melayani kebutuhan administrasi. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan lokal (Dwiyanto, 2017). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur secara langsung berpengaruh pada kualitas interaksi sosial dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, pelatihan administrasi perkantoran modern di Negeri Passo dapat dikatakan berhasil baik dari segi peningkatan kapasitas individu maupun penguatan kelembagaan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis staf kelurahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai efisiensi, tanggung jawab, dan inovasi dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Dengan kolaborasi yang baik antara tim pengabdian dan pihak kelurahan, program ini menjadi model nyata

bagaimana transformasi digital dapat diimplementasikan secara bertahap di tingkat

pemerintahan lokal untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing.

## SIMPULAN

Kegiatan pelatihan administrasi perkantoran modern yang dilaksanakan di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan profesionalisme staf kelurahan. Melalui pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung dan pendampingan teknis, peserta mampu memahami prinsip-prinsip administrasi publik modern serta mengaplikasikan teknologi digital dalam mendukung efisiensi pelayanan. Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pengabdian masyarakat dapat menjadi solusi konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Keberhasilan pelatihan ini juga menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi digital birokrasi publik menuju pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas, mencakup pengelolaan data berbasis cloud, penggunaan sistem informasi kelurahan, serta keamanan dokumen digital. Pemerintah daerah juga diharapkan mendukung dengan penyediaan infrastruktur dan kebijakan yang memfasilitasi

penerapan administrasi berbasis teknologi. Selain itu, penting bagi pihak universitas untuk terus menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah dalam mengembangkan program pelatihan terapan yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya menjadi sarana edukatif, tetapi juga motor penggerak perubahan nyata dalam sistem administrasi publik di tingkat kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia: Tantangan dan Strategi Implementasi*. Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Transformasi Digital dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemenpan RB.
- Kurniawan, T. (2022). *Tata Kelola Administrasi Publik di Era Digital: Konsep dan Praktik*. Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, A. (2021). *Smart Governance: Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*. Rajawali Pers.